JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 6 NO 1
JANUARI 2020

jrak@plb.ac.id

ANALISIS EFISIENSI BELANJA NEGARA PERIODE 2014 – 2016 DI PSTNT-BATAN

Sakti Muda Nasution – Politeknik LP3I

ABSTRAK

This research entitled "Analysis of State Expenditure Efficiency on Budget Realization Report for 2014-2016 period in PSTNT BATAN Bandung". The research as outlined in this Final Assignment aims to determine the State Expenditure Efficiency on Budget Realization Report for 2014-2016 period in PSTNT BATAN Bandung. The research method used is descriptive analysis method that the authors describe the results of observation and analyze the data obtained in the field. After analyzing and discussing the problem, the writer concludes that the State Expenditure Efficiency on Budget Realization Report for 2014-2016 period in PSTNT BATAN Bandung can be categorized as "Highly Efficient".

Key words: Efficiency, Analyzing, Budget

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selain daripada PNBPN pada satker pemerintahan selalu ada yang namanya Belanja Negara, yaitu segala hal yang berhubungan dengan pencairan dana atau pengeluaran dana pemerintah untuk menjalankan operasional pada satker itu sendiri. Belanja Negara terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Kemudian terakhir adalah Hibah, pada dasarnya hibah yang dimiliki pemerintah tidak jauh berbeda dengan hibah pada umumnya. Yaitu pemberian dari suatu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan satker untuk memberikan dukungan dan juga kontribusi mereka dalam menjalankan operasional satker tersebut. Hibah dapat terdiri dari dua macam jenisnya, yang pertama adalah Hibah Belanja Barang dan Hibah Belanja Modal. Keunikan dari Laporan Realisasi Anggaran ini sendiri adalah sebagai penentu berapa besaran penerimaan satker untuk negara dan juga berapa besar belanja negara yang terpakai dari anggaran negara.

Perencanaan anggaran yang dibuat pun setidaknya harus memenuhi syarat sebagai salah satu bidang penting dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan pada masing-masing satker. Namun terkadang perencanaan selalu menimbulkan perbedaan ketika memasuki tahun berjalan berikutnya, baik dalam bentuk apapun seperti ada beberapa rencana kegiatan yang lupa untuk

dilakukan estimasi dan menimbulkan satker tersebut akhirnya membuat perubahan rencana. Hal ini lah yang membuat terkadang dalam kurun waktu satu tahun anggaran satker sering kali mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan operasional mereka sampai tahun berakhir. Dengan menggunakan sistem aplikasi pada komputer pun membuat seorang analis keuangan merasa terbantu walau pada prosesnya analis tersebut terkadang lupa ataupun kurang memahami sistem yang digunakan padanya, adapun aplikasi terkait adalah SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrua). Aplikasi tersebut ada banyak pilihan dan juga menu dalam membuat laporan keuangan yang membuat *user* merasa tidak cukup waktu untuk belajar dan mengoptimalkan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Kesalahan sistem yang membuat beberapa pengguna bahkan harus saling meyakinkan diri mereka ketika sedang dalam operasional berlangsung, hal ini pun yang membuat analis keuangan pada akhirnya harus melakukan validasi ulang karena adanya kesalahpahaman beberapa pihak terkait keuangan pada dirinya dalam menyusun laporan keuangan. Masalah lain pada PSTNT BATAN Bandung selain dalam bagian internal adalah pihak eksternal yaitu pihak pemerintah pusat selaku pemilik kebijakan khusus, penentuan kebijakan pemerintah membuat beberapa instansi merasa tidak adanya kejelasan dari banyaknya perubahan dan juga salah sasaran kebijakan pemerintah dalam penentuan anggaran. Berdasarkan dengan uraian diatas mengenai suatu anggaran dan juga hal-hal yang bersangkutan dengan adanya penggunaan anggaran. Dimulai dari usulan yang melatarbelakangi suatu keputusan anggaran dan pencairan dana dalam Belanja Negara, suatu bagian yang membuat penulis memiliki keinginan untuk meneliti hal tersebut. Maka penulis pun akan mengambil judul penelitian “Analisis Efisiensi Belanja Negara periode 2014-2016 di PSTNT-BATAN Bandung.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui Analisis Efisiensi Belanja Negara atas Laporan Realisasi Anggaran Periode 2014 -2016 di PSTNT-BATAN Bandung.

LANDASAN TEORI

Efisiensi Belanja Negara

Pengertian Rasio Efisiensi dikutip dari buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. (Mahmudi, 164) Adapun pengertian lain dari Efisiensi diungkapkan dalam jurnal akuntansi berjudul Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung sebagai berikut :

Pengertian Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu

produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). (Melania Rampengan dkk).

Sehingga dari uraian penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa efisiensi adalah suatu hal yang dapat dipergunakan semaksimal mungkin dalam kegiatan dengan dana yang sekecil-kecilnya, dan dalam menghitung suatu efisiensi Belanja Negara dalam pemerintahan dapat menggunakan Rasio Efisiensi Belanja. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah realisasi anggaran yang terpakai dalam satu tahun anggaran dibagi dengan jumlah Anggaran Belanja pada satu tahun anggaran yang sama dengan realisasi anggaran, kemudian dikali dengan presentase senilai 100. Rumus Rasio Efisiensi Belanja dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan kutipan Mahmudi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Belanja Negara Total}} \times 100 \%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi, dapat diketahui sejauh mana satker dapat menyerap alokasi dana yang diberikan pemerintah padanya menggunakan tabel khusus. Tabel Efisiensi memiliki beberapa tingkat kategori untuk mengetahui daya serap dana secara baik atau tidak. Pada tingkatan pertama adalah cakupan 100% ke atas yang dianggap “Tidak Efisien” pada suatu satker. Tingkat kedua adalah rentang 90% sampai 100% yang dinilai “Kurang Efisien”. Tingkat ketiga adalah rentang 80% sampai 90% yang dinilai “Cukup”. Tingkat keempat adalah rentang 60% sampai 80% yang dinilai “Efisien”. Tingkat terakhir adalah dibawah 60% yang merupakan penilaian “Sangat Efisien” pada suatu satker. Jumlah persentase tersebut adalah jumlah daya serap yang mampu suatu satker kelola sampai satu tahun anggaran berakhir. Adapun rincian tabelnya, sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria dalam Efisiensi Belanja Negara.

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60 %	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

Pengertian Belanja Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah Belanja negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Realisasi Anggaran

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah SAP Nomor 24 tahun 2005 No 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran

disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Begitupun pada suatu pemerintahan yang menggunakan pelaporan dengan tujuan yang hampir sama dengan perusahaan swasta lainnya, namun untuk tujuan Laporan Keuangan Pemerintah khususnya Laporan Realisasi Anggaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang didalam tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut adalah mampu memberikan informasi kepada ruang lingkup LRA itu sendiri, seperti Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Suatu laporan keuangan pada masing-masing instansi memiliki pos-pos atau yang disebut sebagai komponen yang mendukung dalam laporan keuangan, begitu pun sama halnya dengan Laporan Realisasi Anggaran yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 24 tahun 2005, bahwa suatu Laporan Realisasi Keuangan memiliki beberapa komponen antara lain :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau defisit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi Belanja Negara

Dalam pembedaan penelitian ini, penulis memulai dengan menganalisa Belanja Negara yang dimiliki oleh PSTNT BATAN Bandung dalam Laporan Realisasi Anggaran, berikut merupakan tabel perbandingan antara realisasi dan juga anggaran per tahun 2014. Penulis mengambil bagian pos Belanja Negara yang selanjutnya akan dilakukan metode analisis. Perbandingan Belanja Negara yang telah terealisasi selama satu tahun 2014, untuk Belanja Pegawai dengan anggaran senilai Rp 19.530.789.000 mampu untuk diserap sebesar Rp 17.461.603.818, kemudian untuk Belanja Barang dengan anggaran senilai Rp Rp 6.436.685.000 mampu diserap sebesar Rp 5.845.748.152, dan Belanja Modal dengan anggaran Rp 7.937.187.000 mampu diserap sebesar Rp 7.650.427.000.

Berdasarkan data diatas maka untuk mencari besaran nilai efisiensi, kemudian akan menggunakan rumus perbandingan antara Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal) terhadap Belanja Negara Total yang dikalikan dengan persentase seratus, sebagai berikut :

1. Analisis Belanja Pegawai 2014

$$\text{Efisiensi} = \frac{17.461.603.818}{30.957.778.970} \times 100\% = 56,40 \%$$

2. Analisis Belanja Barang 2014

$$\text{Efisiensi} = \frac{5.845.748.152}{30.957.778.970} \times 100\% = 18,88 \%$$

3. Analisis Belanja Modal 2014

$$\text{Efisiensi} = \frac{7.650.427.000}{30.957.778.970} \times 100\% = 24,71 \%$$

Ketiga analisis tersebut kemudian disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang standar efisiensi suatu Belanja Negara, hasil dari Belanja Pegawai dengan nilai presentase 56,40 %, Belanja Barang dengan nilai 18,88 %, dan Belanja Modal dengan presentase 24,71 % maka masing-masing Belanja tersebut dianggap “Sangat Efisien” karena dibawah dari 60 %

Perbandingan Belanja Negara yang telah terealisasi selama satu tahun 2015, untuk Belanja Pegawai dengan anggaran senilai Rp 21.379.306.000 mampu untuk diserap sebesar Rp 20.007.247.239, kemudian untuk Belanja Barang dengan anggaran senilai Rp 8.840.638.000 mampu diserap sebesar Rp 8.041.235.060, dan Belanja Modal dengan anggaran Rp 5.716.021.000 mampu diserap sebesar Rp 5.646.753.599.

Berdasarkan data diatas maka untuk mencari besaran nilai efisiensi, kemudian akan menggunakan rumus perbandingan antara Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal) terhadap Belanja Negara Total yang dikalikan dengan persentase seratus, sebagai berikut :

1. Analisis Belanja Pegawai 2015

$$\text{Efisiensi} = \frac{20.007.247.239}{33.695.235.898} \times 100\% = 59,38 \%$$

2. Analisis Belanja Barang 2015

$$\text{Efisiensi} = \frac{8.041.235.060}{33.695.235.898} \times 100\% = 23,86 \%$$

3. Analisis Belanja Modal 2015

$$\text{Efisiensi} = \frac{5.646.753.599}{33.695.235.898} \times 100\% = 16,76 \%$$

Ketiga analisis tersebut kemudian disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang standar efisiensi suatu Belanja Negara, hasil dari Belanja Pegawai dengan nilai presentase 59,38 %, Belanja Barang dengan nilai 23,86 %, dan Belanja Modal dengan presentase 16,76 % maka masing-masing Belanja tersebut dianggap “Sangat Efisien” karena dibawah dari 60 %.

Perbandingan Belanja Negara yang telah terealisasi selama satu tahun 2016, untuk Belanja Pegawai dengan anggaran senilai Rp 20.641.465.000 mampu diserap sebesar Rp 20.228.290.761, kemudian untuk Belanja Barang dengan anggaran senilai Rp 8.135.805.000 mampu diserap sebesar Rp 7.721.425.860, dan Belanja Modal dengan anggaran Rp 4.554.278.000 mampu diserap sebesar Rp 4.304.270.829.

Berdasarkan data diatas maka untuk mencari besaran nilai efisiensi, kemudian akan menggunakan rumus perbandingan antara Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal) terhadap Belanja Negara Total yang dikalikan dengan persentase seratus, sebagai berikut :

1. Analisis Belanja Pegawai 2016

$$\text{Efisiensi} = \frac{20.228.290.761}{32.253.987.450} \times 100\% = 62,72 \%$$

2. Analisis Belanja Barang 2016

$$\text{Efisiensi} = \frac{7.721.425.860}{32.253.987.450} \times 100\% = 23,93 \%$$

3. Analisis Belanja Modal 2016

$$\text{Efisiensi} = \frac{4.304.270.829}{32.253.987.450} \times 100\% = 13,34 \%$$

Ketiga analisis tersebut kemudian disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang standar efisiensi suatu Belanja Negara, hasil dari Belanja Barang dengan nilai 23,93 %, dan Belanja Modal dengan presentase 13,34 % maka masing-masing Belanja tersebut dianggap “Sangat Efisien” karena dibawah dari 60 %. Sedangkan untuk Belanja Pegawai dengan perolehan presentase 62,72 % dikategorikan “Efisien”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian berupa Analisis Efisiensi Belanja Negara atas Laporan Realisasi Anggaran Periode 2014-2016 di PSTNT BATAN Bandung, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan berdasarkan garis besar permasalahan yang kemudian dibahas pada bagian sebelumnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Analisis Efisiensi Belanja Negara Tahun 2014

Hasil analisis efisiensi belanja negara pada tahun 2014 di PSTNT BATAN Bandung, dapat dikatakan “Sangat Efisien”.

2. Analisis Efisiensi Belanja Negara Tahun 2015

Hasil analisis efisiensi belanja negara pada tahun 2015 di PSTNT BATAN Bandung, dapat dikatakan “Sangat Efisien”.

3. Analisis Efisiensi Belanja Negara Tahun 2016

Hasil analisis efisiensi belanja negara pada tahun 2015 di PSTNT BATAN Bandung, dapat dikatakan “Sangat Efisien” untuk Belanja Barang dan Belanja Modal, Sedangkan Belanja Pegawai dikategorikan sebagai “Efisien”.

Saran

Dalam efisiensi Belanja Negara di PSTNT BATAN Bandung, untuk keseluruhan hasil analisis dapat dikategorikan “Sangat Efisien” walau ada pada tahun 2016 terdapat Belanja Pegawai yang dikategorikan “Efisien”, pihak instansi dapat meningkatkan efisien belanja dengan menggunakan anggaran Belanja Pegawai semaksimal mungkin dengan disesuaikan berdasarkan kondisi keuangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Directorate General of Budget, *Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan APBN*.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*, Edisi 3, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Rudianto, 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*, Erlangga, Jakarta.
- Republik of Indonesia Government Regulatory Legislation Number 24 Year 2005 about Government Accounting Standardization No. 02 Budget Realization Report
- Neneng Kuswara, 2015. *Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Analisis Komposisi di PSTNT – BATAN Bandung*.
- Yaneka Julastiana, I Wayan Suartana, 2011. *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*, Universitas Udayana.